

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan

Hasil analisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan menunjukkan bahwa program tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Tujuan dari Program Desa Wisata di Desa Kalongan adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Pada tahap kesadaran, masyarakat Desa Kalongan sebagian besar telah mengetahui tentang Program Desa Wisata dan menerima konsep desa wisata sebagai cara untuk mengembangkan potensi desa. Proses penyadaran ini telah memberikan pemahaman awal kepada masyarakat mengenai keberadaan dan tujuan program, meskipun tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih berada pada tahap awal.

Pada tahap pengkapasitasan, telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Wisata. Kegiatan pengkapasitasan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan desa wisata, baik dalam aspek pengelolaan maupun pelayanan. Namun demikian, hasil dari proses

pengkapasitasan tersebut belum sepenuhnya membentuk kapasitas masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya, pada tahap pendayaan, masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Wisata sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Pada titik ini, keterlibatan masyarakat menunjukkan upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Meskipun demikian, peran masyarakat masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan dan belum sepenuhnya berada pada posisi sebagai pengambil keputusan utama.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pemberdayaan. Program tersebut telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, namun pemberdayaan masyarakat masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan agar masyarakat dapat berperan secara lebih optimal dalam pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

4.1.2 Faktor-Faktor Terkait dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan

Hasil dari analisis faktor-faktor terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan menunjukkan bahwa banyak aspek yang saling berkaitan memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan berperan dalam menentukan seberapa baik program tersebut berhasil. Faktor-faktor tersebut membentuk kerangka kondisi yang memengaruhi proses dan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Melalui potensi alam Desa Kalongan, sumber daya alam memberikan dasar untuk pengembangan desa wisata dan menjadi modal awal untuk pengembangan kegiatan wisata berbasis potensi lokal. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pemberdayaan masyarakat memerlukan pengelolaan yang terencana agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan desa wisata dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Tingkat partisipasi masyarakat dan peran mereka dalam pelaksanaan Program Desa Wisata dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan.

Faktor kelembagaan berkaitan dengan keberadaan dan peran lembaga pengelola desa wisata dalam mengoordinasikan pelaksanaan program. Lembaga pengelola telah dibentuk sebagai wadah pelaksanaan Program Desa Wisata, namun perannya masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsi koordinasi dan pengelolaan secara optimal.

Faktor sarana dan prasarana berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan desa wisata. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi bagian dari upaya menciptakan kenyamanan dan aksesibilitas dalam pengelolaan desa wisata. Kegiatan desa wisata membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Faktor kebijakan memberikan arah dan dasar pelaksanaan Program Desa Wisata di Desa Kalongan. Kebijakan yang ada menjadi pedoman dalam

perencanaan dan pelaksanaan program, serta memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata.

Faktor organisasi dan administrasi berperan dalam mengatur pelaksanaan Program Desa Wisata melalui pembagian peran, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya. Keberadaan struktur organisasi dan sistem administrasi menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan desa wisata secara teratur dan terkoordinasi.

Oleh karena itu, komponen-komponen yang terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan saling berhubungan dan membentuk kondisi yang memengaruhi proses pemberdayaan masyarakat. Semua komponen ini harus dikelola secara menyeluruh agar program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

4.2 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tentang implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan menunjukkan bahwa prosesnya masih berjalan dan belum stabil sepenuhnya. Program desa wisata telah membuka ruang partisipasi dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan program, konsistensi keterlibatan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal.

Pada tahap penyadaran dan peningkatan kapasitas, pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Meskipun demikian, pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai pemberdayaan belum merata. Hal ini terlihat dari perubahan

jumlah anggota Pokdarwis serta belum stabilnya usaha masyarakat yang berkembang. Artinya, proses pemberdayaan masih perlu diperkuat agar mampu membangun kesadaran bersama dan komitmen jangka panjang.

Dari sisi ekonomi, desa wisata telah menciptakan peluang usaha dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Namun, dampaknya masih naik turun karena bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dan masih berada pada tahap awal penguatan. Keberadaan objek wisata saja belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa didukung kemampuan manajemen, strategi pemasaran, dan koordinasi yang baik antar lembaga.

Secara kelembagaan, efektivitas pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama antar pemangku kepentingan. Peran pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh potensi desa dan program yang ada, tetapi juga oleh soliditas kelembagaan dan stabilitas partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan penguatan pada aspek kesadaran, kapasitas, dan tata kelola. Temuan ini menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi teoritis dan kebijakan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan.

4.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, seperti yang dijelaskan oleh Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam Pratidina Santoso (2022), implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan tidak dapat dilakukan secara bertahap dan teratur. Menurut teori, pemberdayaan mencapai kemandirian masyarakat melalui tiga tahap: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kondisi struktural dan administratif desa sangat memengaruhi keberhasilan setiap tahap.

Pada tahap penyadaran, kegiatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat memang telah dilakukan. Akan tetapi, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih berada pada tahap awal serta berkurangnya jumlah anggota Pokdarwis menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran tidak selalu diikuti dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa penyadaran sukses tidak hanya bergantung pada komunikasi; kekuatan kelembagaan desa dan sumber daya manusia juga penting.

Pada tahap pengkapasitasan, masyarakat telah menerima berbagai pelatihan dan pendampingan. Namun, menurunnya jumlah UMKM aktif menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan belum sepenuhnya mampu menciptakan usaha yang bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan individu perlu didukung oleh manajemen kelembagaan yang baik, sistem koordinasi yang jelas, serta pembagian tugas yang terstruktur. Tanpa dukungan tersebut, hasil pelatihan cenderung tidak berkelanjutan.

Pada tahap pendayaan, masyarakat telah diberi ruang untuk mengelola destinasi wisata melalui Pokdarwis dan BUMDes. Namun, ketergantungan pada kunjungan wisata yang bersifat musiman menunjukkan bahwa akses terhadap peluang ekonomi belum sepenuhnya menciptakan kestabilan. Sumber daya alam (SDA), ketersediaan sarana dan prasarana, dan dukungan kebijakan belum sepenuhnya memperkuat sistem pengelolaan wisata berkelanjutan, yang semuanya memengaruhi hal ini.

Secara keseluruhan, terdapat enam faktor yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan, yaitu SDA, SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana, kebijakan, serta organisasi dan administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Administrasi Publik tidak hanya berkaitan dengan partisipasi sosial, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan demikian, model tahapan pemberdayaan perlu dipahami secara lebih menyeluruh. Keberhasilan pemberdayaan tidak cukup hanya dengan menjalankan tahapan formal, tetapi harus didukung oleh integrasi aspek sosial, kelembagaan, dan administratif.

4.2.2 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Desa Wisata Kalongan harus diperkuat dalam hal pelaksanaan kegiatan dan sistem tata kelola yang mendukung seluruh proses pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap penyadaran, pemerintah desa dan pengelola desa wisata perlu menyusun sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas dalam struktur kelembagaan

Pokdarwis. Sistem kaderisasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme perekrutan anggota baru secara terbuka, khususnya dari kalangan pemuda desa, serta pemberian pelatihan dasar mengenai pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan. Selain itu, perlu ditetapkan pola pendampingan antar anggota, di mana anggota lama berperan sebagai mentor bagi anggota baru agar terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman secara sistematis.

Lebih lanjut, regenerasi organisasi juga dapat diperkuat melalui pembagian peran yang jelas dan rotasi kepengurusan secara berkala, sehingga tidak terjadi ketergantungan pada individu tertentu. Dengan adanya sistem kaderisasi dan regenerasi yang terstruktur, proses penyadaran tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi komitmen organisasi yang berkelanjutan dan mampu melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan organisasi serta mencegah terjadinya stagnasi dalam pengelolaan desa wisata.

Pada tahap pengkapasitasan, pemberdayaan perlu dilengkapi dengan pendampingan berkelanjutan yang mencakup manajemen usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, dan pembangunan kemitraan. Selain itu, koordinasi antara Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah desa perlu diperjelas melalui pembagian tugas yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih peran.

Pembagian tugas tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan fungsi masing-masing aktor secara spesifik, di mana Pokdarwis berfokus pada pengelolaan operasional kegiatan wisata dan pelayanan kepada pengunjung, BUMDes berperan dalam pengelolaan usaha ekonomi desa seperti pengelolaan

tiket, produk UMKM, dan pengembangan unit usaha berbasis wisata, sementara pemerintah desa berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang mengatur kebijakan, menyediakan dukungan anggaran, serta melakukan koordinasi antar pihak.

Selain itu, perlu dibentuk mekanisme koordinasi rutin, seperti rapat bulanan atau forum bersama, untuk memastikan adanya sinkronisasi program dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pembagian peran yang terstruktur dan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, setiap aktor dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal tanpa saling tumpang tindih. Hal ini penting untuk mencegah duplikasi program, konflik kewenangan, serta memastikan efisiensi dalam pengelolaan desa wisata.

Pada tahap pendayaan, ketergantungan pada kunjungan musiman menunjukkan pentingnya diversifikasi produk wisata serta penguatan hubungan antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. Dukungan pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan desa, terutama dalam promosi, kemitraan, dan akses pembiayaan.

Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan program pendampingan berbasis kebutuhan spesifik desa wisata, misalnya dengan memprioritaskan pelatihan pemasaran digital bagi desa yang memiliki keterbatasan promosi, serta fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha atau agen perjalanan untuk memperluas jaringan pasar. Selain itu, pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pembiayaan melalui kemitraan dengan Lembaga keuangan, seperti

program kredit usaha rakyat (KUR) atau bantuan permodalan berbasis kelompok usaha desa.

Lebih lanjut, dukungan juga dapat diarahkan pada pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang terintegrasi dengan kegiatan wisata, seperti pengolahan produk UMKM, paket wisata edukasi, atau kegiatan berbasis budaya lokal. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan ini, dukungan pemerintah daerah tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan potensi, kapasitas, dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Kalongan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan benar-benar relevan dan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata harus disertai penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola desa. Pemberdayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan akan lebih mudah dicapai melalui kebijakan yang memperhatikan sistem kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya alam, sumber daya manusia, regulasi, dan sistem organisasi dan administrasi. Dengan demikian, fokus kebijakan perlu bergeser dari sekadar menjalankan program menuju pembangunan sistem pemberdayaan yang adaptif dan berjangka panjang.

4.3 SARAN

4.3.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan

- a. Pada tahap penyadaran, Desa Kalongan dapat menerapkan pendekatan penyadaran berbasis aktivitas produktif, yaitu dengan mengintegrasikan

kegiatan sosialisasi dengan kegiatan ekonomi desa, di mana kunjungan terbatas dan paket wisata sederhana dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan awal yang kemudian digunakan kembali untuk mendukung pengembangan desa wisata. Selain itu, desa dapat mengembangkan kegiatan kolaboratif dengan komunitas atau pihak eksternal tanpa pembiayaan penuh dari desa, seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (unit distribusi area Jawa Tengah), dan Bank BUMN/Swasta di Semarang seperti Bank Jateng, BRI, BNI, dan Mandiri. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana promosi sekaligus sumber kontribusi sukarela yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan penyadaran masyarakat.

- b. Pada tahap pengkapasitasan, disarankan agar Desa Kalongan menerapkan pola pendampingan berbasis pembelajaran praktik (*peer learning*) melalui studi tiru dan kerja sama dengan desa wisata yang telah berkembang dengan mengirim perwakilan masyarakat untuk studi tiru ke desa wisata yang telah berhasil. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan desa wisata, sehingga peningkatan kapasitas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi aplikatif. Selain itu, pengkapasitasan dapat dilakukan melalui pembentukan kelas tematik sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan desa, seperti pelatihan pemandu wisata atau pengelolaan homestay, dengan melibatkan narasumber lokal atau pendamping dari dinas terkait. Model ini lebih

realistis dan berkelanjutan dibandingkan pelatihan satu kali, serta dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan desa.

- c. Pada tahap pendayaan, Pada tahap pendayaan, Desa Kalongan disarankan menerapkan sistem pengelolaan desa wisata secara bergilir antar kelompok masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat terlibat secara langsung dan merata dalam pengelolaan kegiatan wisata, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Selain itu, desa dapat membentuk dana bersama dari sebagian hasil desa wisata untuk mendukung usaha masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan wisata. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Kalongan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut pada setiap tahapan pemberdayaan, diharapkan proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan dapat berjalan secara lebih terarah, terlibat, dan berkelanjutan.

4.3.2 Faktor-Faktor Terkait dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan

- a. Faktor Sumber Daya Alam, peneliti menyarankan agar Desa Kalongan melakukan pemetaan potensi wisata secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Aktivitas ini memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama untuk menemukan potensi alam yang dapat menjadi daya tarik wisata. Selain itu, Desa Kalongan dapat membentuk tim kecil yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan wisata, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

- b. Faktor Sumber Daya Manusia, peneliti menyarankan agar masyarakat Desa Kalongan mengikuti pelatihan teratur jika mereka ingin mengambil bagian dalam pengelolaan desa wisata. Pelatihan dapat difokuskan pada keterampilan dasar seperti pelayanan wisata, pengelolaan kegiatan, dan promosi sederhana melalui media sosial. Selain itu, masyarakat yang sudah berpengalaman dapat dilibatkan sebagai pendamping bagi warga lain yang baru bergabung, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara berkesinambungan.
- c. Faktor Kelembagaan, peneliti merekomendasikan agar struktur kelembagaan desa wisata diperjelas berdasarkan fungsi kerja, misalnya membagi tugas dalam bidang promosi, pelayanan, dan pengelolaan kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin untuk menilai kinerja kelembagaan dan memastikan setiap bagian menjalankan tugasnya secara optimal.
- d. Faktor Sarana dan Prasarana, peneliti merekomendasikan agar pengembangan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap dan terencana. Desa Kalongan dapat menyusun rencana sederhana mengenai kebutuhan fasilitas wisata yang prioritas untuk dikembangkan. Selain itu, dapat dipertimbangkan kerja sama dengan pihak luar atau perantau desa dalam mendukung penyediaan fasilitas tertentu, sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran desa.
- e. Faktor Kebijakan, peneliti merekomendasikan agar Desa Kalongan menyusun aturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan desa

wisata, termasuk pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Aturan yang jelas akan memberikan kepastian dalam pelaksanaan program serta memperkuat keberlanjutan desa wisata. Selain itu, perlu dilakukan forum musyawarah secara berkala untuk membahas perkembangan dan arah pengembangan desa wisata agar kebijakan yang diambil tetap melibatkan masyarakat.

- f. Faktor Organisasi dan Administrasi, peneliti merekomendasikan pengelolaan desa wisata didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan transparan, seperti pencatatan kegiatan dan laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Desa Kalongan juga dapat mulai menggunakan sistem pencatatan digital sederhana untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, perlu disusun pedoman atau standar operasional pelaksanaan kegiatan desa wisata agar pelaksanaan kegiatan tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan berjalan sesuai sistem yang telah ditetapkan.